

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga dikenal sebagai *Human Development indeks* (HDI) ialah ukuran mengukur standart hidup, pendidikan, dan harapan hidup seseorang. Indeks Pembangunan Manusia memaparkann masyarakat menerima akses hasil pembangunan, seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dsb. Fungsi IPM untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan ekonomi terhadap taraf hidup masyarakat, serta untuk mengelompokkan suatu negara ke dalam kategori negara maju/berkembang. Ada 3 indikator di dalam IPM antara lain : pendidikan, yang mencakup tingkat melek huruf,rata lama sekolah, kesehatan yaitu angka harapan hidup, ekonomi mencakup pengeluaran per kapita dan daya beli (Lay et al., 2021).

Indonesia termasuk negara dengan populasi manusia terbesar di dunia, hal ini dapat menjadikan modal pembangunan apabila memiliki kualitas sumber daya yang memadai. Berdasarkan konsep bahwa manusia adalah subjek yang terlibat dalam, melaksanakan, dan menikmati hasil pembangunan, jika kaulitas penduduk rendah, maka peran manusia lebih dominan sebagai pihak yang menikmati hasil pembangunan, sementara peran sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan akan semakin berkurang.Penyebaran sumber daya manusia ialah kualitas, jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk (Effendi, 2020). Dimensi tersebut saling terkait satu dengan lainnya selain keterkaitan kuantitas dan kualitas

yang telah disinggung sebelumnya, komposisi dan persebaran sangat penting. Jika perbandingan tsb menggantung tinggi maka dapat diartikan banyak usia penduduk yang tidak mampu menghasilkan. Pembangunan SDM hendak mengalami kesulitan, sebaliknya dengan sdm yang berkualitas yang berkonsentrasi wilayah tertentu. Terdapat pendekatan untuk menumbuhkan manusia diperlukan kualitas modal manusia. (Intan Choirunnisa, 2020).

Indonesia mempunyai SDA yang melimpah, untuk memaksimalkan potensi agar perekonomiannya lebih unggul SDM yang harus dikembangkan. Apabila keduanya sama-sama dimanfaatkan dengan baik akan menunjang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Standart pembangunan manusia yang ditentukan oleh PBB diukurkan memakai HDI (Badan Pusat Statistik (BPS), 2017). IPM bisa dipakai menjadi alat untuk menilai dampak kebijakan perekonomian pada kualitas hidup rakyat, sekaligus menjadi acuan dalam mengklasifikasikan suatu negara sebagai maju, berkembang, terbelakang (Resa Aji Pangestu, 2022).

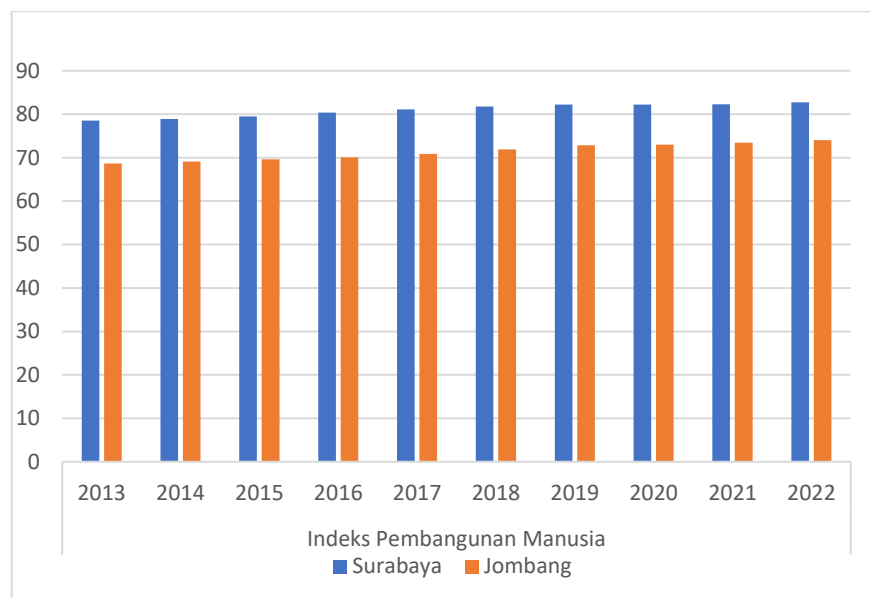
Dalam mengembangkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia terdapat beberapa komponen penting seperti pengeluaran pemerintah, khususnya dibidang bantuan sosial, kesehatan maupun ekonomi. Selain itu, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, seperti peningkatan peluang kerja, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan meningkatkannya Indeks Pembangunan Manusia (SULFIANI, 2024)

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah memiliki otoritas dan kedudukan yang strategis karena tugasnya sebagai pelayan umum guna membangkitkan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. Rencana

pembangunan daerah termasuk aktivitas yang direncanakan untuk dilaksanakan di masa depan. Proses pengembangan program dan kegiatan pertama-tama mencakup sejumlah langkah untuk memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya tersedia. Tujuannya adalah guna meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dilokasi tertentu.

Gambar 1.1.1

Persentase Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang Tahun 2013-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari gambar 1.1 mengenai persentase IPM disimpulkan IPM Kabupaten Jombang mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Meskipun dapat dibandingkan dengan persentase IPM di Surabaya dengan nilai rangking atas di seluruh Kota/Kab yang ada di Jatim, nilai IPM Kabupaten Jombang masih tergolong rendah apabila di bandingkan dengan Kota Surabaya.

Gambar 1.2

**Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023**

Kabupaten / Kota	Peringkat IPM Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur	18	18	16	15	15	15	15	15	14	14
Kabupaten Pacitan	30	30	29	28	29	29	29	29	29	29
Kabupaten Ponorogo	21	21	21	22	23	22	22	20	21	21
Kabupaten Trenggalek	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25
Kabupaten Tulungagung	14	15	14	14	14	14	15	14	15	14
Kabupaten Blitar	23	23	22	23	21	21	21	22	22	22
Kabupaten Kediri	19	19	19	18	18	18	17	17	17	17
Kabupaten Malang	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24
Kabupaten Lumajang	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36
Kabupaten Jember	33	34	34	33	31	31	31	31	31	31
Kabupaten Banyuwangi	22	22	23	20	20	20	20	21	20	20
Kabupaten Bondowoso	31	31	31	31	33	33	33	33	33	33
Kabupaten Situbondo	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30
Kabupaten Probolinggo	32	32	32	32	34	35	35	35	35	35
Kabupaten Pasuruan	28	28	28	29	28	28	28	27	27	27
Kabupaten Sidoarjo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kabupaten Mojokerto	13	13	13	13	12	12	11	12	11	11
Kabupaten Jombang	17	17	17	17	16	16	14	15	14	15
Kabupaten Nganjuk	15	14	15	15	17	17	18	19	18	18
Kabupaten Madiun	18	18	18	19	19	19	19	18	19	19
Kabupaten Magetan	12	12	11	11	11	11	12	11	12	12
Kabupaten Ngawi	20	20	20	21	22	22	23	23	23	23
Kabupaten Bojonegoro	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Kabupaten Tuban	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28
Kabupaten Lamongan	16	16	16	16	15	15	16	16	16	16
Kabupaten Gresik	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9
Kabupaten Bangkalan	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Kabupaten Sampang	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Kabupaten Pamekasan	34	33	33	34	32	32	34	34	34	34
Kabupaten Sumenep	36	36	36	36	34	34	32	32	32	32
Kota Kediri	7	7	6	7	5	5	6	6	6	6
Kota Blitar	6	5	5	5	6	5	5	5	5	5
Kota Malang	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Kabupaten / Kota	Peringkat IPM Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Probolinggo	11	11	12	12	13	13	13	13	13	13
Kota Pasuruan	8	8	8	9	9	10	10	10	10	10
Kota Mojokerto	5	6	7	6	7	7	7	7	7	7
Kota Madiun	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
Kota Surabaya	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1
Kota Batu	10	10	10	10	10	9	9	9	9	8

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Gambar 1.2 ini memperlihatkan peringkat atau posisi skor IPM tiap wilayah. Tabel tersebut diberikan berdasarkan dengan nilai IPM, dengan peringkat 1 adalah yang tertinggi. Dalam data tersebut kota-kota seperti Surabaya atau Malang sering kali mendapatkan peringkat 1 atau 2 dalam nilai IPM dengan perbandingan semua Kota di seluruh Prov Jawa Timur. Sedangkan Kabupaten Jombang bertempat di tengah keseluruhan peringkat IPM di seluruh Kota Jawa Timur. Tingginya IPM di setiap daerah bisa di pengaruhi sebab besarnya tingkat bantuan sosial yang dapat mensejahterahkan masyarakat. Dimana dapat membantu serta melindungi ketika masyarakat terkena dampak penurunan pendapatan, selain itu mengurangi terjadinya kemiskinan. Tentunya bantuan sosial ditujukan untuk memenuhi tingkat hidup pantas dan membantu rumahtangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia termasuk pengeluaran pemerintah untuk sektor bantuan sosial & sektor ekonomi. Keduanya faktor normatif merupakan layanan jasa yang diregulasi oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan swasta terutama pasar. Pengeluaran pemerintah di sektor bantuan sosial secara keseluruhan, dengan peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor tersebut, produktivitas akan meningkat, yang mengarah pada peningkatan pembangunan manusia. Selanjutnya, investasi

publik dapat didefinisikan sebagai biaya yang ditanggung pemerintah di bidang bantuan sosial dan ekonomi.

Bantuan sosial yaitu pendistribusian bantuan yang bersifat selektif, yang tidak terus menerus diberikan dalam bentuk barang ataupun uang yang diberikan terhadap masyarakat. Di Indonesia bantuan sosial diatur atau ditentukan pada UU No 14 Tahun 2019 mengenai kesejahteraan sosial. Dalam UU dijelaskan dukungan sosial yaitu dukungan yang dapat berupa jasa, uang, barang untuk orang yang membutuhkan / rentan akan risiko sosial. Bantuan sosial memang berperan penting bagi masyarakat kondisi ekonomi yang kurang memadai.

Program bansos dirancang untuk membantu memenuhi keperluan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal bagi masyarakat yang berisiko jatuh dalam kemiskinan atau menghadapi kesulitan ekonomi. Dengan adanya bantuan sosial, diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki kualitas hidup, serta memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh kehidupan yang layak. Selain itu, bantuan sosial dapat berperan dalam menciptakan stabilitas sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi yang sulit. Kondisi yang ada di kabupaten Jombang masih terdapat bantuan sosial yang belum merata. Sebagian besar masyarakat dengan kategori ekonomi kurang mampu belum menerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu perlunya strategi dalam mengatasi hal seperti ini, agar nantinya kesejahteraan dapat meningkat di kabupaten Jombang dan akan mendorong perkembangan IPM.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk komponen dugaannya mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Kemampuan penduduk dalam

mengonsumsi untuk membeli barang sehari-hari dapat di pengaruhi oleh perubahan jumlah hasil PDRB, hal ini berhubungan dengan IPM, yakni indikator pendapatan (Handayani & Woyanti, 2021). Kebijakan tersebut tercermin dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran tersebut merupakan biaya yang diperlukan ketika pemerintah memilih untuk membeli produk atau jasa di gelontorkan untuk menjalankan strategi. Pengeluaran pemerintah dalam konteks nyata bisa digunakan indikator seberapa besar aktivitas pemerintah yang didanai pengeluaran tersebut. Semakin banyak dann besar kegiatan yang dilakukan pemerintah, semakin besar pengeluarannya. Rasio pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasional menjadi dimensi dari seberapa besar kewajiban pemerintah dalam perekonomian (Cliff Laisina et al., 2015).

Upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tidak hanya terbatas pada meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk sektor bantuan sosial dan ekonomi. Pendapat tersebut tidaklah tanpa alasan, karena rendahnya produktivitas masyarakat merupakan masalah lain yang perlu ditangani oleh pemerintah. Produktivitas masyarakat yang rendah secara keseluruhan pasti akan mempengaruhi pencapaian PDB ataupun melambatkan percepatan pertumbuhan ekonomi, yang gilirannya akan menyebabkan pembangunan manusia yang rendah di Indonesia. Jika dilihat dari perspektif tatanan masyarakat daerah, tingkatan PDRB dapat digunakan untuk mengukur produktivitas.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek dalam prosedur fiskal, adalah Dokumen APBN dan APBD menguraikan langkah-langkah pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan memutuskan berapa banyak uang yang harus dikumpulkan dan dibelanjakan setiap tahun. Tujuannya

untuk menyeimbangkan output, lapangan kerja, dan harga sekaligus menolong perkembangan perekonomian (Ayu Dita Anantika & Sasana Hadi, 2022).

Pembangunan bidang kesehatan termasuk hal penting mewujudkan pembangunan di suatu daerah. Ketetapan pengeluaran publik untuk kesehatan pada kenyataannya lebih tinggi daripada ketetapan publik untuk pendidikan tingkat kesehatan dalam suatu daerah juga mempengaruhi pertumbuhan maupun perkembangan IPM. Yang mana jika pemerintah memberikan pelayanan terbaik melalui kesehatan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Untuk menilai kinerja ekonomi yang berkembang, pertumbuhan ekonomi paling penting, terutama menyelidiki perolehan pembangunannya perekonomian yang sudah dicapai negaranya (Mahroji, 2019). Meskipun otonomi daerah merupakan bagian penting dari perbaikan dan pemerataan kesejahteraan hidup rakyat, tetapi itu saja tidak dikatakan cukup. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran pemerintah yang secara berkelanjutan mendukung sektor perekonomian yang mengedepankan masyarakat. Disertai dengan strategi yang solid dan kuat untuk mendorong masyarakat miskin untuk bergabung ke dalam usaha lebih produktif & pasar yang lebih baik.

Kemampuan suatu wilayah dapat menjamin keberhasilan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengadaan, pengelolaan sumber daya dan SDM yang baik. Setiap upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan di suatu daerah beralasan untuk meningkatkan kuantitas dan macam kesempatan kerja tersedia bagi masyarakat. Proses pembangunan manusia menunjukkan perkembangan ekonomi yang lebih baik, meskipun pencapaian ini tidak terlepas pada kualitas SDM di daerah tersebut. Untuk melihat pembangunan ekonomi,

modal manusia pada sektor bantuan sosial, kesehatan dan ekonomi harus dipertimbangkan sebagai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita serta kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak. SDM berkualitas tinggi menunjukkan pembangunan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output .

Asas pertumbuhan ekonomi merupakan proses pertumbuhan output perkapita ketika jangka waktu yang lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan output per kapita, memberikan besar pilihan untuk konsumsi barang dan jasa berkorelasi dengan peningkatan kapasitas beli masyarakat.

Berawal latar belakang diatas penelaah tertarik membuat penelitian berjudul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Bantuan Sosial, Sektor Kesehatan, Dan Pertumbuhan Ekonomi pada IPM Kabupaten Jombang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Bantuan Sosial Berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jombang?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan Berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jombang?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitiann ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk ketahui dan menjelaskan bagaimana belanja pemerintah untuk bantuan sosial memengaruhi indeks pembangunan manusia Kabupaten Jombang.
2. Untuk ketahui dan menjelaskan bagaimana investasi pemerintah di sektor kesehatan memengaruhi IPM Kabupaten Jombang.
3. Untuk ketahui dan menjabarkan adanya dampak perkembangan perekonomian pada IPM Kabupaten Jombang.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berlandaskan latar belakang tersebut yang memberikan ruang lingkup masalah yang nantinya penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah bagaimana belanja pemerintah mempengaruhi indeks pembangunan manusia di sektor bantuan sosial, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dijalankan, yaitu:

1. Bagi pemerintah atau instansi: sebagai gambaran dan pertimbangan menentukan arah kebijakan terkait dengan IPM di Kab Jombang menggunakan perkembangan perekonomian, perawatan kesehatan, dan bantuan sosial sebagai tolok ukur.

2. Bagi akademis dan peneliti bisa menjadikan suatu wacana, informasi, serta tambahan referensi bagi penelitian ke depannya atas relevansi pada bidang ekonomi.